

## **ANALISIS PERAN DESA DALAM IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

**Divia Salsabila<sup>1</sup>, Hasjad<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha<sup>1,2</sup>

\*Korespondensi : [diviasalsabila104@gmail.com](mailto:diviasalsabila104@gmail.com)

### **Abstract**

*Indonesia is a country that has various tribes, cultures and religions, beside that Indonesia is also identical with its government starting from the provincial, district/city, sub-district and village/sub-district levels, talking about government there are things that need to be considered in the context of decentralization, discussing village decentralization has an important role because the village can be a center for community services, local decision making, local economic development and increasing community participation, the challenges that must be faced in the implementation of decentralization in the village include limited resources, skills and capacity as well as coordination and synchronization. decentralization is very important for regional progress because it can increase accountability and efficiency of government besides that the community can more easily monitor and evaluate the performance of government in the village in the sense of transparency to realize a clean and dignified government (good government)*

**Keyword:** Role Of Village, Implementation, Decentralization, Governance

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku, Budaya dan agama, selain itu Indonesia juga identik dengan Pemerintahannya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, Dan desa/kelurahan. Berbicara tentang pemerintahan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks desentralisasi. Membahas tentang desentralisasi desa memiliki peran penting. Karena desa dapat menjadi pusat layanan masyarakat, Pengambilan keputusan lokal, Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat, Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi desentralisasi Di desa antara lain keterbatasan keterbatasan sumber daya, Keterampilan dan kapasitas, Serta koordinasi dan sinkronisasi. Desentralisasi sangat penting untuk kemajuan Daerah karena dapat meningkatkan akuntabilitas Dan efisiensi pemerintahan selain itu juga Masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi Kinerja pemerintah desa dalam artian Transparansi untuk mewujudkan pemerintahan Yang bersih dan bermartabat (good governance).

**Kata Kunci:** Peran Desa, Implementasi, Desentralisasi, Pemerintahan

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam suku budaya dan agama. Hal yang paling mencolok di Indonesia adalah sistem pemerintahannya. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai ke desa. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem Trias politika. Yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Untuk membangun Indonesia yang lebih maju diperlukan antar kerjasama antara pemerintah dan daerah. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan salah satunya Adalah implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Berbicara tentang desentralisasi, desa memiliki peran penting Untuk melakukan implementasi desentralisasi

pemerintahan Indonesia Mengapa dikatakan demikian Karena desa menadi pusat pelayanan masyarakat, Pengambilan keputusan lokal, pengembangan Ekonomi lokal, dan peningkatan partisipasi Masyarakat. Namun uga bisa menghadapi Tantangan seperti Keterbatasan sumber daya, Keterampilan dan kepastian Oleh karena itu perlu dilakukan upaya Untuk meningkatkan keterampilan keterampilan dan kapasitas di desa Serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi di pemerintah Daerah dan pusat khususnya Di tingkat desa, Desentralisasi memang dapat Membawa banyak manfaat Seperti meningkatkan akut akuntabilitas dan efisiensi pemerintah, Meningkatkan pelayanan masyarakat, Dan meningkatkan pengembangan ekonomi lokal Dengan demikian desentralisasi dapat menadi salah satu Kunci untuk mewuudkan pemerintahan yang bersih Dan bermartabat (good governance) di Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat Yang memiliki struktur sosial, ekonomi, Dan budaya yang khas Biasanya terletak di daerah pedesaan yang terpencil maupun pedesaan yang mau Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Wilayah geografis, Masyarakat, Struktur sosial, ekonomi, Dan budaya adapun fungsi desa Biasanya menadi pusat pertanian dan perkebunan Dapat uga menadi pusat pelayanan sosial bahkan sampai pendidikan Terutama dalam konsep pembangunan mengapa dikatakan desa sangat penting dalam Implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia Karena dapat dikatakan pemerintahan yang besar dimulai dari pemerintahan yang kecil Terutama dalam konteks pembangunan Desa memiliki peran yang sangat penting Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan Maka dari itu Pemerintah dan masyarakat harus kera sama Untuk meningkatkan kualitas hidup Dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya di masyarakat, Dalam menganalisis peran desa Dalam mengimplementasi kan desentralisasi Pemerintahan di Indonesia, Memiliki pendapat yang cukup beragam Akan tetapi lebih banyak menilai dalam hal-hal positif Karena Menganggap bahwa desentralisasi pemerintahan di Indonesia khususnya di desa Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sehingga dapat Memberikan peluang kepada masyarakat Lokal untuk meningkatkan kemandirian dalam melakukan pembangunan ataupun pemberdayaan di desa.

Desentralisasi desa Di Indonesia secara resmi dimulai Dengan penerapan undang-undang nomer 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah. Namun, peraturan ini disempurnakan Menadi undang-undang nomer 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Namun dalam konteks desa desentralisasi lebih lanut Dikuatkan melalui undang-undang nomor 16 tahun 2014 Tentang desa Undang-undang menadi tonggak penting Dalam memperkuat posisi desa sebagai Subek pembangunan bukan hanya administratif.

Dari pemaparan di atas sudah elas bahwa peran desa dalam implementasi desentralisasi pemerintahan daerah sangat penting terutama dalam konteks pembangunan walaupun masih banyak masyarakat yang bertentangan dengan desentralisasi pemerintahan daerah namun Tidak menghalangi partisipasi dan semangat pemerintah untuk menalankan desentralisasi pemerintahan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil udul analisis peran desa dalam implemtasi desentralisasi pemerintahan di indonesia

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Analisis Peran Desa**

Secara garis besar Analisis peran desa adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui

perkembangan Atau proses pemeriksaan Dan memecahkan suatu masalah atau topik Menadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami sebuah struktur Dalam menganalisis peran desa dapat dilihat dari sisi ekonomi, Sosial, pendidikan dan bisnis Adapun enis-enis analisis Yang dapat dilakukan adalah Analisis descriptive, Analisis eksploratif, Analisis komparatif, Dan analisis kauSal, Adapun analisis yang sering dilakukan di desa Meliputi kebutuhan masyarakat Seperti kebutuhan pangan, papan, dan sandang Atau biasa disebut dengan kebutuhan dasar. Ada uga disebut dengan kebutuhan mendasar meliputi Kebutuhan pendidikan kesehatan dan rekreasi.

### **Konsep Implementasi Desentralisasi**

Adapun berbagai upaya Yang dapat dilihat dari analisis peran desa dalam implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia Adalah peningkatan partisipasi masyarakat Contohnya seperti pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan ini masyarakat diberikan kebebasan untuk memberikan keputusan untuk mengambil keputusan atau memberikan pendapat Dalam pembangunan di desanya adi konsepnya masyarakat dapat memberikan kritikan kepada pemerintah ketika pembangunan yang dialankan itu tidak sesuai, Ada uga yang disebut dengan pengawasan, adi masyarakat bisa mengawasi pembangunan secara langsung di desanya. Selain itu ada uga yang disebut dengan Transparansi dan akuntabilitas Maka dengan upaya upaya tersebut Implementasi desentralisasi di desa Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Dan meningkatkan kualitas hidup di desa.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan desentralisasi di desa Yang pertama itu pengalihan kewenangan Dalam artian pemerintah pusat Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa Untuk mengelola pemerintahan dan pembangunanya Kedua yaitu pengembangan kapasitas Pemerintah desa meningkatkan kapasitasnya Untuk mengelola semua urusan Pembangunan dan pemerintahan Yang terakhir yaitu Pengalokasian sumber daya Untuk mendukung teradinya desentralisasi di desa Pemerintah pusat mengalokasikan sumber daya Kepada pemerintah di desa.

Sedangkan mekanisme desentralisasi Itu perencanaan partisipatif Ketika pemerintah desa melakukan Perancangan pembangunan desa maka masyarakat harus ikut andil Dan harus ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan di desa, Selanjutnya pengambilan keputusan Pemerintah desa tidak boleh semena-mena Dalam mengambil keputusan pembangunan semuanya harus sesuai dengan Prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat, Pengawasan dan evaluasi Pemerintah desa dapat melakukan pengawasan dan evaluasi Terhadap pembangunan yang dilakukan di desa.

Prinsip-prinsip desentralisasi Yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat Sangatlah penting dalam mendorong adanya desentralisasi di desa Terutama dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan, Adanya transparansi Pemerintah desa harus terbuka dalam artian Transparansi dalam pengelolaan dana desa Baik itu dana pembangunan dan dana yang digunakan untuk sumber daya, Akuntabilitas Pemerintah desa harus bertanggung awab Atas Pelaksanaan pembangunan di desa.

Ada beberapa enis desntralisasi yaitu Desentralisasi administratif, Desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, Desentralisasi Ekonomi, Desentralisasi asimetris

Ketika teradi kasus desentralisasi di Indonesia banyak hal yang menadi pertanyaan tumpang Tindih di kalangan masyarakat karena kewenangan yang seharusnya diberikan dari pemerintah

**Divia Salsabila, Hasjad**

pusat ke daerah beralan dengan lancar namun banyak desa atau daerah yang tidak menyalurkannya dengan baik tidak luput dari itu banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat siapa yang harus disalahkan apakah pemerintahannya atau pemerintahnya Contoh kasusnya seperti program APBD awa timur pada masa periode 2009 sampai 2014 Untuk rakyat yang dialokasikan beberapa isu Kerakyatan strategi seperti pendidikan

Namun tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam menalakan implementasi desentralisasi di desa Di antaranya seperti Ketimpangan pembangunan antar daerah Karena tidak semua daerah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sama Dalam mengelola pemerintahan otonomi daerah maupun pembangunan Sehingga daerah yang mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih melimpah otomatis akan lebih cepat berkembang dibanding desa atau daerah yang terpencil, Yang kedua adanya potensi korupsi Di tingkat daerah, Kurangnya koordinasi antar daerah dan pusat Tumpang Tindih antar kebiakan pemerintah daerah dan pusat Sering terjadi Terutama dalam bidang kewenangan seperti kesehatan dan pendidikan

Dasar hukum Implementasi desentralisasi di Indonesia Sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 18: Mengatur tentang pembangunan wilayah Indonesia menadi provinsi, Kabupaten, dan kota. Pasal 18A: Mengatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, Undang-undang pemerintahan daerah Undang-undang nomor 23 tahun 2014: Mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-undang desa Undang-undang nomor enam tahun 2014: Mengatur tentang desa termasuk pengelolaan dan kewenangan desa. Peraturan pemerintah Undang-undang nomor 17 tahun 2018: Mengatur tentang implementasi undang-undang pemerintahan daerah

Desentralisasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, Berhasil dan tidaknya suatu desentralisasi tergantung dari pemerintahan di desanya atau di daerahnya Partisipasi masyarakat, Dan komitmen dari pemerintahan pusat Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi atau biasa disebut dengan otonomi daerah

Adapun tantangan desentralisasi yang sering dihadapi di berbagai daerah adalah Mungkin sering dengar bahwa terhambatnya desentralisasi daerah dikarenakan adanya korupsi Atau penyalahgunaan kekuasaan, Serta kurangnya koordinasi antar daerah dan pusat Atau minimnya pengetahuan pemerintah daerah Untuk mengelola sesuatu urusan yang dimandatkan atau yang diberikan oleh pusat

Desentralisasi diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang diperbarui, dan melalui undang-undang ini Pemerintah pusat dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sistem pemerintahan di daerahnya, Adapun beberapa Contoh urusan yang menadi kepentingan dan atau kewenangan pemerintah daerah Di antaranya pendidikan, gizi, kesehatan, pangan papan sandang Serta pekeriaan umum dan perizinan

Adapun contoh desentralisasi di Indonesia salah satunya yaitu Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Perda atau peraturan daerah Yang mengatur segala aspek dan enis kehidupan di daerah Seperti perizinan Tata ruang dan pengelolaan lingkungan.

### **Konsep Pemerintahan**

Pemerintahan Adalah sebuah lembaga yang bertuan untuk Mengatur sekaligus mengelola Suatu negara atau daerah Maupun organisasi seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemerintahan

di Indonesia menganut tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif Adapun bentuk pemerintahan di Indonesia yaitu demokratis yang artinya pemerintahannya dipilih Oleh masyarakat melalui Pemilu Dalam artian dari rakyat untuk rakyat, adanya pemerintahan tersebut dipergunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat menyalurkan seluruh bentuk keluhan dari masyarakat terutama di kabupaten kota, dan desa.

Sistem pemerintahan uga dapat dibagi bagi, ada yang dimaksud dengan sistem pemerintahan pusat ada yang dimaksud dengan sistem pemerintahan kabupaten/kota dan ada yang dimaksud dengan sistem pemerintahan di desa. Merujuk dengan judul yang saya ambil analisis peran desa dalam implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia adu kita berfokus pada desentralisasi pemerintahan di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil maupun data dari segala sesuatu yang berhubungan dengan inti pembahasan diperlukan sebuah metode penelitian. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara merumuskan sesuatu menggunakan akal dan pemikiran untuk mendapat titik terang dari sebuah judul untuk mendapatkan hasil yang tepat, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk menganalisis sebuah laporan Sebelum menjadi laporan yang sempurna perlu proses penelitian agar tidak ada kekeliruan di dalamnya, metode adalah petunjuk atau pedoman seseorang Ilmuan atau seorang ahli untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan mereka hadapi dan untuk mengetahui rintangan apa saja yang akan mereka hadapi dan melakukan analisis data dan pengumpulan data dengan cara wawancara penduduk dan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat selain itu, etnis penelitian, yang dimaksud analisis adalah penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada penelitian, sistematika dan pemikiran tertentu yang bermaksud tujuannya untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis atau menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan ada normatif selain itu pendidikan uga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang digunakan dalam masyarakat. Maka dari itu di perlukan pendidikan di kalangan masyarakat agar dapat memberikan hasil yang baik pada saat melakukan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis peran desa dalam implementasi desentralisasi pemerintahan Indonesia**

Desa Memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia Dapat dilihat dari undang-undang desa yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengelola rumah tangga sendiri serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Dalam artian desa bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi pembangunan di desanya serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Beberapa penelitian mengatakan bahwa ketidaksuksesan akan kebijakan desentralisasi disebabkan oleh desain kelembagaan yang dibangun tidak sesuai dan efisien. Ketidakefisienan kelembagaan ini diduga menjadi penyebab dasar terjadinya stagnasi atau berhentinya perkembangan perekonomian di beberapa negara berkembang lainnya contohnya Amerika latin, timur tengah, uni Soviet, Asia tengah dan kepulauan Karibia Menjadi bukti dan saksi bisu akan adanya hal ini. Lantas bagaimana dengan negara Indonesia ini? menurut we Hana 2010 kebijakan desentralisasi otonomi daerah

dimulai tahun 1974 hingga 2010 menjadi fenomena laboratorium penelitian ekonomi kelembagaan yang sangat dinamis.

Desentralisasi adalah suatu persoalan yang menyangkut tentang hak atau hak asasi manusia karena di dalam desentralisasi memberikan kebebasan individu untuk mengimplementasikan hasil pemikirannya dan bertindak atas dasar partisipasi masing-masing tiap individu pasti memiliki kualitas hidup yang terbaik menurut versinya masing-masing seperti berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi dan tidak ada kontrol langsung dari pemerintah pusat karena sudah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah dan wilayahnya masing-masing sesuai dengan konsep desentralisasi/otonomi daerah.

Di era desentralisasi sekarang ini pemerintah dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan penyediaan aspek-aspek sosial atau public servis yang dibutuhkan oleh masyarakat ada pula yang disebut dengan pergeseran paradigma dari good government menjadi good governance kegiatan ini melibatkan hubungan antar masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam mengurus pemerintahan di daerahnya jadi keduanya itu harus seimbang agar desentralisasi tidak hanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tapi juga pemberian wewenang kepada masyarakat untuk mengatur daerahnya. Terkait dalam hal ini masih banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat karena masih banyak daerah desentralisasi dan atau daerah yang diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri malah menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri seperti korupsi APBD. Berita tentang maraknya korupsi APBD di Indonesia banyak menerat kepala daerah dan mengusik rasa ketidakadilan dari masyarakat, bagaimana tidak hampir semua provinsi di daerah Indonesia ini sudah menyangang kasus korupsi yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga berujung di erui besi atau di pengadilan, dengan adanya fakta-fakta ini tentu memicu kekhawatiran dalam tata kelola pemerintahan desentralisasi di Indonesia bahkan (ICW) mencatat bahwa pada tahun 2010 kasus korupsi keuangan negara menempati peringkat atau posisi pertama di Indonesia tak tanggung tanggung, pemerannya atau pelakunya tidak lain tidak bukan merupakan pemerintah dan mantan pemerintah daerah harusnya mereka yang dapat memberikan contoh kepada masyarakat tetapi malah melakukan tindakan yang merugikan negara.

Asas desentralisasi Undang-undang nomor 32 tahun 2014 mengatur tentang Tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah yakni lembaga Dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di sebuah daerah. Hal ini diatur dalam pasal 57 Sampai 331 yakni penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah berpegang teguh pada asas yang terdiri dari kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, efisiensi, Efektivitas dan keadilan.

Desentralisasi dapat diterapkan pada negara yang berbentuk kesatuan kekuasaan yang tertinggi hanya dimiliki oleh pemerintah pusat terdapat di dalam negara kesatuan desentralisasi menjadi pilihan dalam proses pembangunan di daerah karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola otonomi daerahnya sendiri. Adapun perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi adalah terdapat pada norma-norma validitas teritorial yang berbeda sementara sentralisasi memiliki norma-norma validitas teritorial yang sama. Menurut Rondynelli dan Cheema (1983) Manfaat signifikan dari desentralisasi adalah sebagai berikut:

- Menjadi sarana mengatasi keterbatasan perencanaan nasional terpusat

- Memotong seumlah rantai birokrasi dan prosedur yang sangat terstruktur
- Meningkatkan pengetahuan dan kepakaran para peabat terhadap masalah dan kebutuhan daerah
- Memungkinkan penetrasi kebiakan politik nasional yang lebih baik daerah-daerah yang auh dari ibukota nasional
- Memungkinkan perwakilan yang lebih besar (dalam berbagai lembaga politik, Agama, etnis, dan suku) dalam pengambilan keputusan pembangunan dan menghasilkan kesetaraan dalam alokasi sumber daya
- Memperluas kapasitas lembaga pemerintahan daerah dan swasta untuk mengambil ahli Fungsi yang biasanya tidak dilakukand baik oleh pemerintahan pusat
- Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat
- Menyediakan struktur yang mampu mengkordinasikan secara efektif di berbagai kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah pusat
- Mengembangkan partisipasi warga masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan
- Mengimbangi pengaruh dan kontrol atas kegiatan pembangunan oleh elit lokal yang berakar
- Memungkinkan pemimpin lokal untuk menemukan layanan dan fasilitas secara lebih dan efektif di masyarakat
- Menciptakan produk administratif yang lebih fleksibel inovatif dan kreatif

Selanjutnya, pertanyaan pokok dan mendasar yang perlu dipertanyakan adalah apakah kebiakan desentralisasi di Indonesia telah sukses? mungkin sebagian orang banyak yang meragukan akan adanya keberhasilan desentralisasi di Indonesia yang dirancang pada tahun 2000 Mulanya, proses melalui di atau dimulainya desentralisasi itu tergesa-gesa atau terburu-buru maklum karena Habibie saat itu sedang dituntut kineranya untuk menadi seorang presiden tapi banyak masyarakat menganggap itu hanya sebagai by coincidente belaka maka, dengan kondisi yang menuntut adanya reformasi di segala bidang adilah kedua undang-undang yang menopang adanya desentralisasi ditetapkan.

Sebenarnya apa sih yang salah dengan desentralisasi di Indonesia ini? apakah pemerintahnya atau sistemnya?. Seperti yang dielaskan di atas tadi Dorongan desentralisasi di Indonesia salah satunya adalah tuntutan dari negara donor yang memang saat ini sedang giat melaksanakan kampanye desentralisasi ke negara-negara berkembang oleh karena itu sistem desentralisasi baik itu dari segi penyerahan kewenangan, keuangan, maupun perangkat lain yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan negara-negara berkembang, Sebenarnya kita harus optimis dengan sistem sekarang yang sudah beralan dan diusahakan oleh pemerintah walaupun memang tidak bisa dibilang sebagai sistem yang paling ideal dari beberapa segi, pemerintah telah berhasil mentransfer kepada public, dan ini merupakan sebuah terobosan yang baik dalam sebuah proses pembangunan. Proses komunikasi yang sinergis dan harmonis antar pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tonggak utama dalam keberhasilan pemerintahan desentralisasi disebut daerah dan sebuah wuud keberhasilan adanya demokrasi.

Namun kalau boleh kita ambil contoh dari satu negara Afrika dan Uganda misalnya dorongan untuk melakukan desentralisasi bukan datang dari negara donor atau faktor eksternal di negaranya akan tetapi dari komitmen internasional politisi masyarakat dan pemerintah yang berkeinginan kuat untuk membangun sebuah negaranya yang demokrasi dan dikokohin dengan desentralisasi lintas

mengapa negara Indonesia tidak bisa seperti itu? kenapa Indonesia harus dipencet dulu oleh negara donor untuk melakukan desentralisasi? mungkin ini adalah salah satu pesimis terhadap desentralisasi yang memandang bahwa negara Indonesia gagal menalakan desentralisasi tetapi dari sekian banyaknya hasil studi menerangkan dan menelaskan bahwa desentralisasi di Indonesia dan umumnya di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi terhadap perkembangan ekonomi kesenangan maupun pengembangan partisipasi masyarakat masih belum elas.

Wujud ketidaksuksesan desentralisasi dan otonomi daerah telah menunjukkan pada ketidakpastian suatu aturan hal ini akhirnya berdampak pada biaya ekonomi tinggi untuk penyediaan pelayanan public dan pembangunan ekonomi daerah. Sejumlah studi di negara maju dan berkembang menunjukkan berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong pelaksanaan akuntabilitas secara horisontal. Meski begitu, kondisi ini juga dapat membuka peluang teradinya saluran baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi kolusi dan nepotisme loby, suap atau gratifikasi, selain itu salah satu resiko dari pemberlakuan sistem ini memungkinkan teradinya kontrol penuh elit daerah.

Korupsi di tingkat daerah merupakan bentuk kera sama yang manis antar kekuasaan politik di daerah, dengan kelompok kepentingan tertentu sehingga menghasilkan koruptor koruptor di suatu daerah 75% peraturan daerah lahir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun hal ini malah menjadi ajang korupsi bagi pemerintah untuk itu chaniago mengusulkan, selain dicantumkan prosedur administrasi dan pertanggung jawaban anggota dewan, juga perlu ada prosedur politik yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi proyek APBD, misalnya dengan adanya rapat terbuka atau laporan rutin masyarakat melalui media massa. berikut ini beberapa modus korupsi daerah saat menalakan desentralisasi:

- Korupsi pengadaan barang dengan modus penggabungan nilai barang dan jasa dari harga pasar dan kolusi dengan kontraktor dalam proses tender
- Penghapusan barang investasi dan aset negara dengan modus memborong investasi kantor untuk kepentingan pribadi dan menjual investasi kantor untuk kepentingan pribadi
- Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya dengan modus memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi
- Manipulasi proyek proyek fiksi Seperti jalan, embatan, kantor, sekolah dan asrama dengan modus pungutan komisi tidak resmi terhadap kontraktor
- Proyek fiktif fisik dengan modus dana dialokasikan dalam laporan resmi tapi secara fisik proyek itu nihil
- Manipulasi dan pemeliharaan dan renovasi fisik dengan modus pemotongan dana pemeliharaan dan dana renovasi fisik
- Manipulasi proyek pembangunan ekonomi rakyat dengan modus penyerahan dalam bentuk uang
- Korupsi waktu kera dengan modus meninggalkan pekerjaan, melayani calo yang memberi uang tambahan, dan menunda pelayanan umum.

Desentralisasi yang diberlakukan sejak tahun 2001 leadernya membuat menaemen daerah lebih baik, partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal, pemerintahan lokal atau daerah ada dua komponen yang penting

yakni bupati (walikota) dan DPRD kedua otoritas ini mempunyai mandat untuk menentukan hitam dan putihnya suatu daerah tersebut atau sukses dan tidaknya suatu desentralisasi di desa tersebut. Tindakan mereka pula yang menentukan apakah masyarakat dapat menerima keputusan keputusan yang diambil pemerintah di daerah itu apakah mencerminkan aspirasi masyarakat atau tidak.

Kemudian meskipun desentralisasi berarti transfer otoritas kepala daerah atau pemerintah lokal kita sebagai mahasiswa harus cermat dalam menganalisis atau menganalisa hal-hal yang tidak baik dan menyimpang dari praktik praktik desentralisasi itu sendiri tuuannya agar public tidak disuguih dengan pemahaman yang keliru dengan adanya desentralisasi ini yang pada akhirnya hanya menadi sebuah retorika politik, atau sebagai mimpi indah penghias tidur. Akses akses desentralisasi yang saya maksud di sini adalah ada dua hal yang pertama otonomi daerah Yang diberlakukan di tengah krisis ekonomi yang amat parah daerah otonomi memerlukan sumber daya yang besar untuk membiayai keperluan sendiri padahal pertumbuhan ekonomi sangat kecil, Alhasil investasi sangat sulit untuk diperoleh dan sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan sangat terbatas oleh karena itu banyak kabupaten dan kota menggunakan berbagai banyak cara untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah. Yang kedua, otonomi daerah didirikan di tengah tengah euforia masyarakat, yakni semangat dan rasa percaya diri yang tinggi bahwa masyarakat yang sering kali bersifat kekerasan dan melewati batas batas kewajaran seperti pembakaran kantor polisi, pembakaran kantor DPRD, dan kantor pemerintah daerah lainnya. Suasana kericuhan seperti ini diwarnai dengan rasa kebebasan yang besar sehingga otonomi daerah diberlakukan di tengah tengah kekacauan dan ketidakpastian hukum.

### **Peran Pemerintah Dalam Melakukan Desentralisasi Di Desa**

Selain masyarakat pemerintah uga memiliki peran yang sangat penting dalam proses desentralisasi di sebuah desa atau daerah yang mencakup aspek pembinaan, pengaturan, dan pengawasan adi dengan teradinya kera sama antar pemerintah daerah dan pusat maka akan membangun regulasi yang baik untuk menalin teradinya desentralisasi yang berkelanjutan, Pemerintah pusat memberikan regulasi, memberikan bantuan keuangan, dan pembina pemerintah daerah untuk menalankan otonomi daerah. Di sisi lain pemerintah daerah bertanggung awab atas pelaksanaan desentralisasi dalam artian menerima mandat dari pemerintah pusat untuk membangun sebuah daerah termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pentingnya peran pemerintah dalam melakukan desentralisasi desa Desentralisasi yang berhasil akan mendorong partisipasi dari masyarakat dan akan terus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa mereka bisa membangun daerahnya masing-masing prinsip sentralisasi atau otonomi daerah.

Kedudukan dan kewenangan desa berdasarkan undang-undang Desa, telah disesuaikan dengan konsep desa yang dikehendaki undang-undang 1945 dengan tidak lagi ditempatkan di sup ordinat atau satelit dari struktur desa seperti kabupaten dan kota apalagi kecamatan substansi utama Peraturan dalam undang-undang desa tidak semata mata mengatur pada kewenangan kepala desa atau aparat desa melainkan lebih kepada menamin negara untuk mengakui menghormati dan melindungi karakteristik asli suatu daerah tertentu mempertahankan otonomi daerah dari pihak lain. Oleh karena itu, pilihan konsep desa atuh pada konsep desa adat (Good government community) alternatif bagi desa yang sudah memudar hak asal usul dan nilai-nilai kearifan lokal.

Dalam konteks pemerintahan desa, Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh undang-undang desa. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan bimbingan teknis, menyediakan sumber daya manusia dan keuangan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan di tingkat desa. Pemerintah desa juga berperan dalam memberikan finansial kepada pemerintah desa guna upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik melalui alokasi dana desa dan dana penimbangan dalam hal ini, peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan Desa menjadi sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan transparan. Pemerintah daerah berperan sebagai pembina dan fasilitator bagi pemerintah desa dalam upaya mencapai Tujuan pembangunan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di tingkat desa mereka melibatkan diri mereka sendiri dalam pengawasan terhadap pembangunan Desa, penggunaan anggaran, serta kinerja pemerintah desa secara umum.

### **Perundang-Undangan Yang Mengatur Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Desentralisasi Undang-Undang Desa**

Analisis undang-undang yang mengatur tentang peran pemerintah Daerah dan implementasi undang-undang desa sangat penting untuk memahami landasan hukum dan kerangka kerja yang mengatur berhubungan antara Pemerintah daerah dan pemerintah desa. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks ini antara lain undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang desa, serta peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Undang-undang desa memberikan landasan hukum bagi para pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa. Dalam berbagai aspek pemerintahan desa termasuk dalam pencernaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan pengembangan kapasitas pemerintah desa.

Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan daerah adalah dukungan teknis yang harus diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa hal ini mencakup panduan, bimbingan, dan bantuan dalam berbagai aspek. Dengan adanya rincian mengenai dukungan teknis ini diharapkan pemerintah dapat memberikan arahan yang tepat bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya.

Selain dukungan teknis Peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Pemerintah desa, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik tak memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi peraturan daerah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah hingga tercipta pengawasan yang efektif dan bertanggung jawab.

Selain itu peraturan daerah juga mengatur alokasi anggaran yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pengertian daerah ini memberikan rincian terhadap proses mekanisme lokasi anggaran desa termasuk besaran dana yang diberikan serta penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang alokasi anggaran ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan pemerintahan desa mendapatkan sumber daya ruang yang cukup untuk melakukan program dan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan dalam melaksanakan implementasi desentralisasi pemerintahan Indonesia Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, penyusunan program pembangunan, dan pengolahan administratif. Dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa mereka akan lebih mampu menalatkan tugas dengan penuh rasa tanggung awab mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang desa selain itu penting uga dalam pelaksanaan kebiakan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan atau program partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat, putusan dan kebiakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan peningkatan teknologi informasi membangun sistem informasi desa dan penggunaannya atau aplikasi yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses administrasi, pelaporan, monitoring kegiatan desa. Teknologi informasi uga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terakhir, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi undang-undang desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan terkait analisis peran desa dalam implementasi desentralisasi pemerintahan di Indonesia, mengenai analisisnya masih banyak menjadi permasalahan di kalangan masyarakat dan masih banyak menuai polemik tumpang tindih karena masih banyak desa yang menjalankan desentralisasi tidak sesuai dengan undang-undang desa atau seenaknya, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang desentralisasi di Indonesia tema sangat penting karena memang ada beberapa desa yang mengalami peningkatan yang signifikan yang awalnya dari desa yang terpencil dan ketinggalan zaman dengan adanya desentralisasi ini desa tersebut menadi desa yang mau dan berkembang dikarenakan adanya pembangunan berkelanjutan sumber daya manusia peningkatan pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Dengan kata lain kebijakan desentralisasi di Indonesia belum sesuai dengan harapan yaitu desentralisasi yang hanya menguntungkan elit serta penguasa lokal, Desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di masyarakat dan desentralisasi fizkal yang semu atau hanya semata pembangunan belaka. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya desentralisasi ini meningkatkan angka korupsi di Indonesia menjadi urutan ke 10 terbesar saat ini jadi hal ini sangat memerlukan perhatian dari pemerintah, seperti mencantumkan administrasi dalam pertanggungjawaban anggota dewan juga perlu ada prosedur politik yang melibatkan masyarakat dalam peran pengawasan proyeksi dan pelaksanaan APBD misal dengan adanya rapat terbuka atau adanya laporan rutin ke masyarakat melalui media massa.

Sehubungan dengan akan hal hal ini perlu di dilakukan beberapa pertama stigma negatif dalam implementasi desentralisasi otonomi harus diawab dengan semangat pendalaman desentralisasi melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi yakni kesejahteraan public, desentralisasi yang mensejahterakan rakyat perlu dikembangkan dengan diawali dengan adanya informasi pemikiran bahwa implementasi desentralisasi lebih baik dari sekedar hak politik, tetapi juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan rakyat. Artinya ukuran untuk mengaudit mutu desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung

jawab sebagai ukuran bekeranya rezim desentralisasi yang mensejahterakan rakyat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alisahbana, Arminda S. Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Bandung: FE Universitas Padjajaran,2000.
- Andi Gadong, Agussalim. Pemerintahan daerah: Kajian politik dan hukum. Bogor: Ghalia Indonesia,2007.
- Brodjonegoro. Bambang PS."Desentralisasi sebagai kebijakan fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mengurangi kesenjangan antar daerah"
- Aritonang. D. (2016) kebijakan desentralisasi untuk desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014
- Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-undang nomor 3 tahun 2024 pembaruan UUD desa nomor 6 tahun 2024
- Fatmawati, F. Hakim, L, & Mappammiring, M. (2019) Pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat
- Lestari, N. A.,(2023) Implementasi kebijakan desentralisasi di desa
- Kardim m. Simanjuntak. (2015) implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di indonesia
- Mutiara kardina, Aldri frinaldi, Lince magriasti, Hendrabaldi. (2024) implementasi desentralisasi dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa mandiri di indonesia
- Yuwanto. (2016) implementasi kebijakan desentralisasi dan daya saing daerah di kota semarang
- Santo. (2024) kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah di indonesia